

Implementasi kebijakan pembangunan permukiman kumuh di kota Tangerang : studi kasus di Kampung Bulak Kambing Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda dan Kampung Sukatani Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari

Achmad Ricki Fauzan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=103375&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini penting mengingat Kota Tangerang merupakan penyangga Kota Jakarta dimana pertumbuhan penduduknya yang sangat besar yaitu 4,86%. Tingginya angka tersebut disebabkan laju urbanisasi penduduk dari daerah ke Kota Tangerang yang cukup besar. Kebanyakan dari mereka datang untuk mencari kerja sebagai buruh pabrik, mengingat di Kota Tangerang terdapat hampir 1000 buah pabrik industri, baik berskala kecil, menengah maupun besar. Tingginya jumlah penduduk tanpa disertai dengan penanganan tata kota yang belum baik menyebabkan bermunculannya permukiman-permukiman kumuh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan permukiman kumuh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang telah mampu mengubah kampung Sukatani dan Bulak Kambing ini menjadi terlihat lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi kondisi lingkungannya, peningkatan pendapatan masyarakatnya, peningkatan pendidikan masyarakatnya dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakatnya. Selain itu pula ada perubahan perilaku penduduk untuk menjaga kondisi lingkungannya tetap bersih dengan mengadakan kerja bakti secara berkala.

Dalam implementasi kebijakan ini, masyarakat diajak untuk turut serta memperbaiki kondisi kampungnya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan semua kegiatan program. Ini berarti mereka tidak diperlakukan sebagai obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan yang aktif dalam

berperan serta mensukseskan perbaikan kampungnya. Tanggapan masyarakat sendiri terhadap kebijakan ini sangat positif sekali. Mereka menyambut baik adanya kebijakan ini dan siap untuk membantu agar dalam pelaksanaan kegiatan programnya dapat berjalan dengan baik.

Akan tetapi kelemahan daripada implementasi kebijakan ini adalah kurangnya koordinasi antar aparat terkait di lapangan. Serta tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan pasca kebijakan ini berakhir di kedua kampung tersebut. Oleh karena itu Bappeda selaku instansi yang bertugas sebagai koordinator dinas/instansi yang terlibat dalam kebijakan ini harus lebih mampu lagi mengkoordinir dinas/instansi tersebut dengan mengadakan pertemuan minimal 1 bulan sekali selama implementasi kebijakan tersebut sedang berjalan. Hal ini penting untuk membahas permasalahan yang terjadi di lapangan agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan program diantara para aparat pelaksana dari berbagai dinas/instansi tersebut. Sedangkan pembinaan yang berkelanjutan penting dilaksanakan pasca kebijakan ini berakhir di kedua kampung tersebut untuk mengantisipasi agar kondisi kedua kampung tersebut tidak kembali kumuh.